

**PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR  
TANPA PENGECUALIAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GIANYAR BALI**

Anak Agung Anggia Dyah Gardewi  
NPP. 30. 1039

*Asdaf Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali*  
*Program Studi Keuangan Publik*  
Email : 30.1039@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Arina Romarina, SE, M.Ec, Dev.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the of the management and administration of fixed assets that have not been orderly so that the presentation of fixed asset balances does not reflect the actual information. **Purpose:** This study is intended to know, understand, and describe the management of regional fixed assets in Gianyar Regency, describe the factors that become obstacles and the efforts made in overcoming these inhibiting factors. **Method:** The research method used is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data that has been collected is analyzed starting from data reduction, data presentation, and conclusions. **Result:** Based on the results of the analysis, it was found that in general, the management of regional fixed assets in Gianyar Regency was good, although there were still some errors in the inventory of land fixed assets, The findings obtained by the authors in this study are that in general the management of regional fixed assets in Gianyar Regency is good, although there are still some problems in the inventory of land fixed assets. the use of the SIMDA BMD application is not yet optimal, and there is still a lack of reliable human resources to run the SIMDA BMD application

**Conclusion:** Data collection is required related to assets that have not been inventoried and coordinated with Regional Apparatus related to documents that are lacking for inventory of fixed assets.

**Keyword :** Inspection Results Report, Fixed Asset Management

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada temuan tentang pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum tertib sehingga mengakibatkan penyajian saldo aset tetap belum mencerminkan informasi yang sebenarnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan pengelolaan aset tetap daerah di Kabupaten Gianyar, menguraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bahwa secara umum pengelolaan aset tetap daerah di Kabupaten Gianyar sudah baik walaupun masih ditemukan beberapa permasalahan pada inventarisasi aset tetap tanah. belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMDA BMD, dan masih kurangnya sumber daya manusia yang handal untuk menjalankan aplikasi SIMDA BMD. **Kesimpulan:** Diperlukan adanya pendataan terkait aset yang belum diinventarisasikan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan dokumen yang kurang untuk penginventarisasian aset tetap.

**Kata Kunci :** Laporan Hasil Pemeriksaan, Pengelolaan Aset Tetap

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aset Tetap menurut (Sinurat, 2015) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. Bentuk penyelenggaraan otonomi daerah terdiri dari beberapa urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Selain pengelolaan keuangan daerah. Adapun pengelolaan barang milik daerah atau yang dapat disebut dengan aset. Pengelolaan aset sendiri dilaksanakan bertujuan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya dengan tetap dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif berdasarkan prinsip *good governance*

Pengelolaan Aset pemerintah berfokus pada efektifitas Public Service dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak semata-mata berupa Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, namun juga aset pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Secara sederhana, pengelolaan kekayaan (aset) meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (*monitoring*). Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan strategi yang tepat. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 komponen laporan keuangan pokok setidaknya-tidaknya meliputi (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil dari pengelolaan tersebut dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memenuhi ketentuan tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Bali. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah diserahkan, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut, bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar mampu mempertahankan pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan cermat. Peninjauan dilakukan berdasarkan opini yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian di 2016 hingga 2021. Dengan pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar mendapatkan penghargaan sebab sudah dapat konsisten bertahan pada apresiasi Wajar Tanpa Pengecualian 6 (enam) kali terus menerus. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang usaha pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mengelola aset tetap daerah sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tanpa paragraf penjas yang menekankan pada pengelolaan aset tetap daerah.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Se-Bali. Penatausahaan atas pendapatan daerah belum memadai sehingga mengakibatkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum optimal dan kekurangan penetapan pajak daerah. Kedua, permasalahan dalam pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pelaksanaan Belanja Honorarium pada Belanja Barang dan Jasa belum sepenuhnya mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Selanjutnya, pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan belum berdasarkan data kepesertaan yang akurat sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya. Dan terakhir, pengelolaan dan penatausahaan asset tetap yang belum tertib sehingga mengakibatkan penyajian saldo asset tetap belum mencerminkan informasi yang sebenarnya. Berdasarkan temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kabupaten/Kota Se-Bali, masih ditemukan temuan tentang pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum tertib sehingga mengakibatkan penyajian saldo aset tetap belum

mencerminkan informasi yang sebenarnya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan aset tetap masih menjadi sorotan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengelolaan aset tetap daerah. Penelitian skripsi yang disusun oleh Dimas Prayoga dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2019 berjudul *Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang* menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan aset tetap di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia bidang pengelolaan aset di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang salah satu tugasnya menginventarisir aset dan banyaknya aset membuat pengelolaan aset kewalahan (Prayoga, 2019). Penelitian Afni Nooraini, Chatarina De Ricci R. Mamulak dan Marja Sinurat menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara belum dilaksanakan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala, ketidaklengkapan dokumen perolehan aset, kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan SIMDA BMD dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua serta koneksi jaringan SIMDA BMD yang bermasalah (Nooraini, 2022). Penelitian Hadinur Rahman, Meyzi Heriyanto dan Tri Sukirno Putro menunjukkan pengelolaan aset tetap atau Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (Hadinur Rahman, 2020).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penulis mengambil lokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori dari Doli D. Siregar dengan metode kualitatif dalam mencari fakta dari keadaan di lapangan.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan aset tetap daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang menggunakan operasionalisasi konsep peneliti yang dijadikan dasar atau acuan dalam melakukan penelitian konsep yang abstrak menjadi lebih konkrit dan terukur validitas dan reabilitasnya. Sumber data primer pada penelitian ini melalui proses observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* pada penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dan Bidang Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yang berjumlah 3 orang. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data selama

dilapangan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis meneliti pengelolaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dengan memperhatikan Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset, Pengendalian dan Pengawasan Aset.

#### **3.1 Pengelolaan Aset Tetap**

##### **3.1.1 Inventarisasi Aset**

Inventarisasi aset tetap berupa tanah di Kabupaten Gianyar dilaksanakan secara berkala sesuai dengan Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kabupaten Gianyar baru saja melaksanakan inventarisasi aset tanah pada tahun 2019, dan untuk aset peralatan dan mesin yang dilaksanakan pada tahun 2020 atau sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Inventarisasi aset tetap tanah di Kabupaten Gianyar masih mengalami beberapa kendala seperti permasalahan sengketa tanah yang terjadi terhadap lahan Pasar Gianyar antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Desa Adat Gianyar dimana pemicu terjadinya konflik ini tanah adat tersebut dimasukkan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dimana seharusnya yang masuk KIB hanya bangunannya saja. Pada saat pihak Desa Adat mengajukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan objek tanah Pasar Umum Gianyar ini. Pada saat yang sama, Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar mengajukan permohonan hak guna pakai atas tanah itu.

##### **3.1.2 Legal Audit Aset**

Landasan hukum dalam pengelolaan aset di Kabupaten Gianyar adalah aspek yang dapat menjelaskan pengelolaannya serta ketentuan-ketentuan apa saja yang dijalankan dalam pengelolaan aset di Kabupaten Gianyar. Hal ini bertujuan agar terhindar dari permasalahan legal berupa masalah kepemilikan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam kegiatan pengelolaan aset di Kabupaten Gianyar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah yang digunakan dalam mengelola aset Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan pernyataan informan dapat disimpulkan pengelolaan aset tanah mengenai legal audit sudah hampir sesuai dengan teori karena walaupun ada permasalahan terkait sengketa tanah dan masih ada tanah yang belum bersertifikat tetapi kabupaten Gianyar sudah melakukan prosedur legal audit sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis.

##### **3.1.3 Penilaian Aset**

Penilaian aset tetap di Kabupaten Gianyar tidak terkendala masalah, untuk penilaian terhadap barang-barang yang akan dipindahtangankan tanah dan bangunan harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang telah bersertifikat dan untuk tim penafsir harga yang dibentuk oleh bupati hanya bisa menafsir harga untuk selain aset tanah dan bangunan. Selama ini penilaian aset yang sudah dilkaukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar lakukan berdasarkan dari asal perolehan aset tersebut. Jika perolehannya dari pelepasan hak dari masyarakat, maka dinilai dari pembeliannya yang kami daftarkan. Begitu juga jika perolehannya dari hibah pihak ketiga, maka kita lihat juga dari harga pembelian asal usul aset tersebut.

##### **3.1.4 Optimalisasi Aset Tetap**

Bentuk optimalisasi aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Gianyar yaitu Optimalisasi fungsi aset di Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Bentuk perjanjian pinjam pakai yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gianyar yaitu dengan cara menyewakan tanah, gedung dan bangunan, serta alat-alat mesin dan peralatan. Seperti halnya perjanjian pinjam pakai Gedung antara pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Bawaslu Kabupaten

Gianyar. Sedangkan kerjasama pemanfaatan itu yaitu dengan menggandeng investor, guna pengelolaannya secara optimal dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah

### **3.1.5 Pengawasan dan Pengendalian**

Dalam penerapan penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Gianyar masih terkendala. Aplikasi yang dipakai oleh Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar sampai saat ini hanya SIMDA BMD yang memang penggunaannya terkendala dalam pengoptimalan aplikasi yang tentunya berpengaruh dalam hal pelaporan karena sampai saat ini kami belum berani mengembangkan aplikasi ini. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang tidak dapat menggunakan aplikasi ini karena *security system*nya kurang memadai. Kurang memadai disini maksudnya pada saat pihak kami memberikan *password* mereka menjadi leluasa untuk mengubah data tanpa sepengetahuan pihak kami jadi semua fitur dari aplikasi ini hanya dijalankan oleh bidang aset saja. pengawasan dan pengendalian aset sudah dilakukan dengan semestinya atau dapat dikatakan sudah sesuai dengan teori karena pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga dengan aturan yang telah ditetapkan walaupun dalam penggunaan aplikasi terkait masih mengalami kendala.

### **3.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dari peneliti diketahui bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar yaitu:

1. Inventarisasi aset tanah yang belum menyeluruh menyebabkan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Gianyar sedikit terkendala;
2. Kurang optimalnya penggunaan aplikasi SIMDA BMD;
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan SIMDA BMD;

### **3.3 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar**

Peneliti melakukan penelitian terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam upaya meningkatkan pengelolaan aset tetap. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara wawancara beberapa narasumber. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara narasumber dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar melakukan upaya sebagai berikut untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap:

1. Kabupaten Gianyar saat ini sedang melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar guna mempercepat pemrosesan sertifikat tanah.
2. Optimalisasi penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Gianyar dilaksanakan dengan mengintensifkan koordinasi dan komunikasi antar pengelola SIMDA BMD.
3. Sosialisasi terkait aplikasi SIMDA BMD di kabupaten Gianyar dilaksanakan dengan metode diklat.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan temuan penting yakni pelaksanaan pengelolaan aset tetap baik dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan serta pengendalian sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya walaupun dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala yaitu aset tetap tanah yang belum diinventarisasikan, belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMDA BMD, dan masih kurangnya sumber daya manusia yang handal untuk menjalankan aplikasi SIMDA BMD. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam hal teori

maupun metode yang digunakan tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

### 3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa dalam mempercepat proses sertifikasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar guna mempercepat pemrosesan sertifikat tanah. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar memudahkan desa adat dan juga masyarakat di wilayah Kabupaten Gianyar untuk mensertifikatkan tanah dengan datang langsung di kantor desa untuk menyerahkan berkas yang dibutuhkan.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Gianyar secara umum sudah baik dari dimensi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan serta pengendalian sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya walaupun dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala pada dimensi inventarisasi aset tanah. Ditemukan beberapa Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Gianyar yaitu masih ditemukannya aset tetap tanah yang belum diinventarisasikan, belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMDA BMD, dan masih kurangnya sumber daya manusia yang handal untuk menjalankan aplikasi SIMDA BMD. Adapun Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mengatasi kendala pengelolaan aset tetap yaitu melakukan percepatan proses inventarisasi aset tanah, optimalisasi penggunaan SIMDA BMD, dan pelaksanaan diklat untuk penggunaan aplikasi SIMDA BMD.

**Keterbatasan penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait analisis lebih dalam faktor makro dan mikro secara detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan aset tetap daerah dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Bali.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Ngakan Ketut Jati Ambarsika, S.E., M.M. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar beserta jajaran yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hadinur Rahman, M. H. (2020). Pengelolaan Aset Daerah dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Nooraini, A. C. (2022). Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*.
- Prayoga, D. (2019). Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. *Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Sinurat, M. (2015). *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Yogyakarta: Alfabeta.